

Media Sosial dan Wacana penundaan Pemilu 2024 Dalam Perspektif Norman Fairclough

Amin Aminudin

Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif, Universitas Budi Luhur
Jl. Ciledug Raya, Petungkang Utara, Jakarta Selatan, 12260. DKI Jakarta
E-mail: amin.aminudin@budiluhur.ac.id

Received: June 2023; Accepted: September 2023; Published: November 2023

Abstract

The discourse on postponing the elections in 2024 is considered a strategy to vent the political appetites of today's rulers who enjoy the opium of power, social media as a space for expression has become a hotly discussed discourse battle, including discussions about postponing the 2024 elections. The formulation of the problem in this research is the purpose of this study is to find out how social media power relations have become a space to fight for discourse on postponing the 2024 general election?. The method used in this study is a qualitative method with a critical discourse analysis theory approach from Norman Fairclough. The paradigm used in this study is the critical paradigm. The data collection technique uses the content analysis method, this method is carried out by analyzing uploads on social media related to the postponement of the 2024 election. The results show that the discourse on postponing the election can be seen in 3 things: First, the narrative/news text used by Twitter social media users not just news texts, but nuanced arguments and descriptions, as was conveyed by Denny Indrayana who is more argumentative than his concern about the alleged postponement of elections and extending the term of office of the rulers. Second, discourse on social media, especially Twitter, tends to raise controversial issues in Indonesia, the issue of controversy in question is that there is an alleged effort against the law and tends to be political, meaning that the interests of the content creator are more dominant than balanced reporting. The last one is that when viewed from an ideological aspect, social media Twitter provides a negative image by cornering the country's rulers, in this case the government leader during President Jokowi's era, so that the public evaluates negatively the action taken by a group of people from the palace.

Keywords: Social Media; 2024 Election; Power Relations; Discourse.

Abstrak

Wacana penundaan pemilu pada tahun 2024 dianggap merupakan strategi melampiaskan nafsu politik penguasa hari ini yang menikmati candu kekuasaan, Media sosial sebagai ruang berekspresi menjadi pertarungan wacana yang hangat diperbincangkan, termasuk perbincangan mengenai penundaan pemilu tahun 2024. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana relasi kuasa media sosial menjadi ruang pertarungan wacana penundaan pemilihan umum 2024 ?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan teori analisis wacana kritis dari Norman Fairclough. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma kritis. Teknik pengumpulan data menggunakan metode *content analysis*, metode ini dilakukan dengan menganalisis unggahan-unggahan di media sosial terkait dengan penundaan pemilu 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wacana penundaan pemilu bisa dilihat 3 hal: Pertama, narasi/teks berita yang dipakai oleh pengguna media sosial twitter tidak hanya sekedar teks berita, akan tetapi bernuansa argumentasi dan deskripsi, seperti halnya yang disampaikan oleh Denny Indrayana yang lebih mengarah argumentasi dari kekhawatirannya tentang dugaan penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan dari penguasa. Kedua, wacana media sosial khususnya twitter cenderung mengangkat isu-isu kontroversial yang ada di Indonesia, isu kontroversi yang dimaksud adalah adanya dugaan upaya melawan hukum dan cenderung bersifat politis yang artinya kepentingan si pembuat konten lebih dominan dari pada pemberitaan yang berimbang. Yang terakhir adalah jika dilihat dari aspek ideologi, media sosial twitter memberikan pencitraan negatif dengan menyudutkan penguasa negeri dalam hal ini pemimpin pemerintah era presiden Jokowi, sehingga publik menilai negatif tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang dari pihak istana.

Kata Kunci: Media Sosial; Pemilu 2024; Relasi Kuasa; Wacana.

doi: <https://dx.doi.org/10.51544/jlmk.v7i2.4407>

© 2021 Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi. This is an open access article under the CC BY-SA license

Website: <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JLMI>

<http://e-journal.sari-mutiara.ac.id>

PENDAHULUAN

Perihal penundaan Pemilu 2024, menjadi sorotan berita karena beberapa alasan, salah satunya berasal dari sorotan tokoh penting dalam pemerintahan, yakni Luhut Binsar Pandjaitan, yang juga menjabat sebagai Menteri dan memiliki kedekatan dengan pemerintahan saat ini. Selain itu, isu tersebut memiliki dampak yang cukup signifikan, tidak hanya bagi partai politik dan para politisi, tetapi juga menimbulkan perdebatan yang intens, memicu polarisasi dan konflik di antara pendukung dan penentang penundaan pemilu. Kabar terbaru terkait perdebatan penundaan pemilu kembali mencuat melalui pernyataan Denny Indrayana, seorang pakar hukum tata negara dan mantan wakil Menteri Hukum dan HAM. Melalui akun Twitter pribadinya @dennyindrayana pada tanggal 2 Juni 2023, ia meminta Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI-P, untuk turut campur menghentikan usaha penundaan pemilu yang menurutnya masih berlanjut. Waktu kini telah mengubah peran Twitter tidak hanya sebagai platform komunikasi dan sumber informasi, namun lebih dari itu (Sipahutar, Poerana, and Nurkinan 2020).

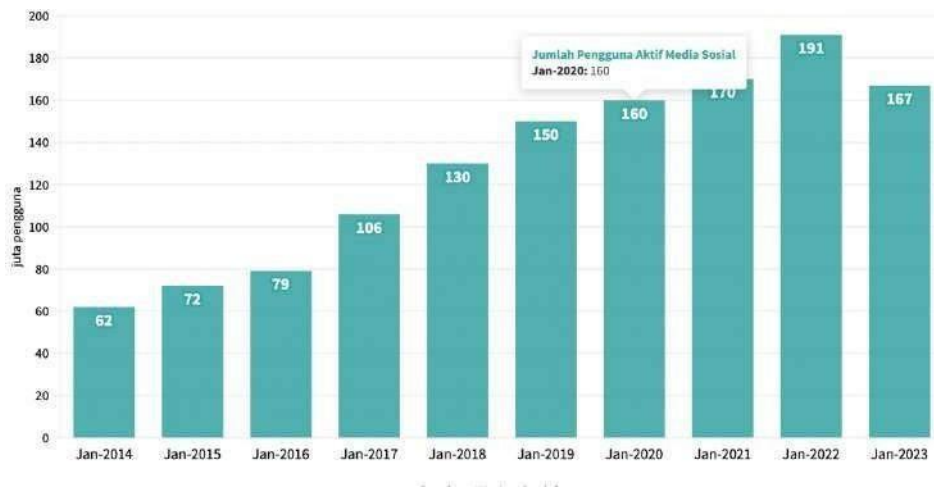
Sadar atau tidak media sosial twitter telah membentuk masyarakat, dimana konsep ini disebut juga sebagai mediasi, dimana media merupaka pendorong besar dikalangan masyarakat media dan informasi saat ini (Aminudin 2022). Informasi yang hadir melalui media sosial juga layaknya media konvensional dalam hal penyebaran informasi. Menurut (Nasrullah 2014) era media sosial adalah era media interaktif, audiens memiliki kemampuan untuk menjadi konsumen sekaligus produsen informasi. Hal ini memungkinkan khalayak untuk memberikan umpan balik langsung dan bahkan menggeser batas antara pemirsa dan produsen informasi. Bukti dunia nyata dapat mendukung klaim bahwa media sosial adalah media interaktif yang sangat kuat dan signifikan. Pertimbangkan fenomena kasus penganiayaan. yang dilakukan oleh anak oknum pegawai pajak yakni Mario Dandy, kasus jalan rusak yang adi diwilayah provinsi lampung yang dimuat oleh Bima yang akhirnya mendapat perhatian publik maya atau yang biasa disebut netizen.

Menurut (Kemp 2023) tahun 2023 ada 167 jutaan pengguna media sosial pada Januari 2023. Media sosial merupakan media penting bagi politisi, partai politik, dan pemerintah untuk berhubungan dengan publik karena banyak orang yang menggunakannya. Salah satu kajian komunikasi massa terkini adalah kajian mengenai media sosial, dimana media sosial digunakan sebagai hal yang memungkinkan untuk mentransmisikan transmisi budaya secara memadai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Fungsi transmisi ini juga disebut sebagai salah satu fungsi esensial, menurut Harold D. Lasswell, seorang tokoh komunikasi massa. Dari satu generasi ke generasi berikutnya, nilai dan standar masyarakat tertentu akan ditransmisikan (Nurudin 2007).

Media sosial digunakan sebagai alat komunikasi politik sebagai hasil dari perkembangan teknologi informasi dan internet yang semakin pesat. Menurut (Nurhidayat and Garis 2023) latar belakang perkembangan komunikasi politik di media sosial menurutnya disebabkan oleh beberapa hal, yakni kemudahan akses internet, potensi pasar politik yang besar, kemampuan berpartisipasi dan berbagi informasi, kekuatan pengaruh media sosial. Media memoderasi dorongan dan tarikan ruang.

Bentuk media sosial yang penuh kebebasan mempunyai peluang besar untuk disalahgunakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Informasi yang dapat diakses dengan cepat di profil pengguna atau *snapshot* (Syecha and Sumanti 2023). Kegiatan yang diunggah oleh pengguna dapat berupa informasi dari status sosial ekonomi pengguna Baik realitas maupun ruang telah diremediasi oleh media. Karena menggunakan digital middleman, proses mediasi ini bisa berjalan dengan cepat. (Bolter and R. Grusin 2000). Ruang digital hari ini telah menjadi pertarungan ruang kuasa. Menurut (Haryadi Santoso 2015) ruang hari ini ruang media tidak lagi

erkuat pada *state based power*. Bukan pula terhenti pada kekuasaan berbasis pasar pada akhirnya digantikan oleh kekuasaan politik. Dominasi berbasis politik ini muncul pada saat politik mendominasi dalam memutuskan semua isu, termasuk krisis kumulatif di sektor media.



Gambar 1 Pengguna Media Sosial Indonesia Yang Aktif (2015-2023)

Sumber: (Shilvina Widi, 2023)

Mencipta opini dan kebenaran menurut Foucault sangat berhubungan antara pengetahuan dan kekuasaan. Tidak ada permainan kekuasaan yang tidak menghasilkan pengetahuan, dan tidak ada kumpulan informasi yang tidak mengkaji dinamika kekuasaan. Manusia modern lahir sebagai objek dan subjek dari penyediaan dan distribusi jaringan kekuasaan, menurut Foucault (Syafiuddin 2018). Analisis kekuasaan Foucault secara bersamaan diartikulasikan pada dua tingkat, yakni empiris dan teoritis. Tingkat pertama didasarkan pada pemeriksaan rinci pada kekuasaan yang spesifik, historis dan bagaimana bentuk-bentuk ini muncul dari bentuk sebelumnya.

Oleh karena itu, ia mengidentifikasi bentuk-bentuk kekuasaan modern, seperti bentuk yang terkait erat yang disebutnya "kekuatan disipliner" dan "kekuatan hayati", dan sebelumnya, bentuk-bentuk pramodern seperti "kekuasaan berdaulat" (Taylor 2014). Foucault juga percaya bahwa pengetahuan dan kekuasaan berjalan beriringan, seperti dua bagian dari koin dan tidak dapat dipisahkan. Tidak ada relasi kekuasaan yang tidak terkait dengan bagaimana suatu bidang pengetahuan berkembang, dan tidak ada pengetahuan yang tidak secara bersamaan mengandaikan dan membentuk relasi kekuasaan (Alfathri 2016). wacana, kekuasaan, dan pengetahuan, mampu memberi corak baru pada pemikiran postmodern. Ide-idenya masih diperdebatkan dengan hangat pada saat ini (Umanailo 2020; Kamahi 2017).

Kekuasaan dalam penundaan pemilu 2024 sangat berkaitan dengan paham Foucault tentang bagaimana kuasa atas pengetahuan ini dinegosiasikan, diperebutkan, dan diubah. Termasuk bagaimana wacana penundaan pemilu yang isunya digelontorkan oleh sekelompok orang demi mempertahankan kuasanya. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melihat bagaimana media sosial membangun wacana penundaan pemilu 2024 dalam perspektif Norman Fairclough.

TINJAUAN LITERATUR

Tinjauan teoritis digunakan untuk menganalisis dan mengkaji berbagai konsep, teori, literatur, atau penelitian yang terkait dengan suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini, tinjauan teoritis terdiri dari tiga penelitian sejenis, yang pertama penelitian yang dilakukan oleh (Ismail et al. 2020) dengan judul *Power and Voices of Authority in the Media Narrative of Malaysian Natives: Combining Corpus Linguistics and Discourse Analysis Approaches*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa istilah “Orang Asli” secara konsisten digambarkan di sekitar narasi berita stereotip seperti isu hak atas tanah dan sumber daya lainnya. Kami juga menemukan bahwa suara para pemimpin istilah “Orang Asli” dibayangi oleh otoritas lain seperti pemerintah negara bagian. Perbedaan penelitian pertama dengan penelitian ini adalah terletak dari media yang di analisis dan fokus yang diteliti.

Penelitian yang kedua yang dijadikan landasan adalah penelitian yang dilakukan oleh (Badara and Jamiludin 2020) dengan judul *Representation of Indonesian women workers: a critical discourse analysis on the newspapers of nationalist-secular and Islamic ideological perspectives*, penelitian ini dipublikasikan pada Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies Vol.10 no.1 tahun 2020, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemberitaan surat kabar Rakyat Merdeka yang berideologi nasionalis-sekuler sedikit mencerminkan perempuan. Representasi digunakan untuk meminta perlakuan yang menguntungkan dari pemberi kerja. Mengikuti permintaan 'pasar' adalah motivasi yang menjadi jelas. Koran Republika, di sisi lain, condong ke doktrin Islam dan menggambarkan karyawan perempuan apa adanya dengan maksud untuk mempromosikan kesetaraan. Ini adalah kesimpulan dari cita-cita ideologis Islam yang dianut oleh surat kabar tersebut. Selain itu, penelitian ini membantah anggapan bahwa Islam menghilangkan perempuan dari masyarakat. Penelitian ini sama-sama menggunakan analisis wacana kritis Norman Fairclough, Perbedaan penelitian kedua dengan penelitian ini adalah terletak dari media yang di analisis dan fokus yang diteliti.

Penelitian terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh (Mouna 2021) dengan judul *Critical Discourse Analysis on the Representation of Muslims in Britain in the Daily Mail Newspaper*, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis sebuah artikel di surat kabar Daily Mail Inggris yang ditulis tentang minoritas Muslim Inggris, Hasil penelitian menunjukkan bagaimana strategi implisit digunakan untuk menampilkan garis biner antara AS dan MEREKA. Kelompok THEM identik dengan ekstremisme, irasionalitas dan penindasan terhadap perempuan sedangkan AS digambarkan sebagai kelompok yang melayani keadilan dan memberantas fanatisme dan radikalisme. Penelitian ini sama-sama menggunakan analisis wacana kritis Norman Fairclough, Perbedaan penelitian kedua dengan penelitian ini adalah terletak dari media yang di analisis dan fokus yang diteliti.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada upaya pendeskripsian mengenai bagaimana relasi kuasa media sosial menjadi ruang pertarungan wacana penundaan pemilihan umum 2024. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran secara faktual, dan sistematis mengenai fakta-fakta dan hubungan dengan fenomena yang diamati.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi content analysis dengan pendekatan kualitatif. Menurut (Santoso 2015) studi content analysis lebih metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasi isi teks atau materi komunikasi lainnya secara sistematis, analisis wacana dipakai untuk menghilangkan kontrol yang dimiliki setiap proses bahasa atas batas wacana, sudut

pandang yang diperlukan, dan topik yang dibahas. Wacana berpendapat bahwa bahasa terus-menerus terlibat

dalam hubungan kekuasaan, terutama dalam hal penciptaan subjek dan bentuk representasi sosial lainnya (Miranti and Sudiana 2021). Berikut adalah model Fairclough ini teks dianalisis secara linguistik, dengan melihat kosakata,semantik, dan tata kalimat(Eriyanto 2005).

Dalam model Fairclough ini teks dianalisis secara linguistik, dengan melihat kosakata, semantik, dan tata kalimat (Eriyanto 2005). Fairclough menyarankan sebuah pendekatan bahasa secara multidisiplin dan menggabungkan analisis bahasa dengan analisis sosiologi. Pendekatan ini memberikan prospek pemikiran 'kritis' terhadap perubahan sosial dan meningkatkan pemahaman manusia (O'regan 2001).

Pendekatan Fairclough dalam menganalisa teks dianggap lengkap karena berusaha menyatukan tiga tradisi yaitu;

1. Dimensi Tekstual (Mikrostruktural), seperti identitas, relasi, dan representasi
2. Penciptaan, pendistribusian, dan konsumsi teks semuanya termasuk dalam dimensi meso-struktural dari praktik produksi teks.
3. Praktek sosial budaya (makrostruktural) yang berdimensi situasional, institusional, dan sosial (Miranti and Sudiana 2021).

Penelitian wacana penundaan pemilu ini menggunakan teknis analisis data, yang mana teknis analisis data merupakan suatu proses yang digunakan dalam pengolahan data, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teknik data berkualitas tinggi berkualitas. Dengan penilaian kualitas, temuan dan keputusan akhir diklarifikasi melalui penilaian atau sistem inti. Penilaian kualitatif yang digunakan adalah metode *benchmarking*, model yang membutuhkan tiga hal: analisis data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi (Sugiyono, 2012). Teknis analisis data ini juga peneliti lampirkan dalam bentuk jadwal pelaksanaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan hasil analisis wacana media sosial tentang penundaan pemilu 2024 dalam perspektif Norman Fairclough yang ada pada media sosial twitter. Analisis media sosial ini merupakan media sosial twitter yang meliputi dimensi tekstual yang dibedah melalui tiga tahap, yakni tahap deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi.



Gambar 5. Surat Terbuka Denny Indrayana Kepada Megawati Soekarno Putri di Twitter

Sumber: (Denny Indrayana 2023)

Gambar diatas merupakan gambar dari twit yang dibuat oleh Akun Denny Indrayana, mengacu pada teori yang digunakan oleh peneliti, yakni teori analisis wacana kritis, formula awal yang digunakan adalah penggunaan teksnya, penggunaan teks bisa dianalisa pada level deskripsi teks, dimana teks ini lebih menekankan pada penggunaan bahasanya. Pada level deskripsi ini diharapkan dapat menggali tema yang diangkat oleh Akun Denny Indrayana mengenai isu penundaan pemilu 2024.

Penggunaan teks pada isu penundaan pemilu yang dituliskan oleh akun Denny Indrayana secara deskripsi menuliskan sebuah teks sebagai berikut:

Yth. Ibu Megawati Soekarnoputri,

Assalamu'aikum Warahmatullah Wabarakatuh, Merdeka, Salam Pancasila!

Ibu Megawati, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Selamat hari Pancasila, Selamat Bulan Bung Karno.

Izin saya menyampaikan surat ini. Ibu Mega adalah negarawan, mengedepankan kepentingan bangsa. Terbukti di 2014 Ibu mencapreskan Joko Widodo. Meskipun, Ibu bisa saja maju sendiri. Lalu, Ibu memilih Ganjar Pranowo, meskipun Ibu bisa memutuskan Mbak Puan Maharani.

Saat ini keselamatan bangsa sedang dipertaruhkan. Masalahnya bukan sistem pemilu tertutup atau terbuka, tapi pemilu yang tertunda.

Saya risau dengan hukum di tanah air. Saya berpendapat, proses hukum banyak bercampur dengan strategi pemilu 2024. Karena itu saya putuskan membawa isu hukum ke ruang publik. Agar tidak diputuskan dalam ruang gelap yang transaksional dan koruptif.

Namun, niat baik untuk mengawal MK misalnya, dalam soal sistem pemilu legislatif, antara proporsional tertutup atau terbuka, dibelokkan menjadi wacana politik, yang dapat berakibat penundaan pemilu.

Siasat penundaan juga masuk melalui dirusakanya kedaulatan partai. Sesuatu yang kita tolak keras. Cukuplah sejarah buram Orde Baru yang mengganggu PDI melalui tangan Soerjadi.

Saat ini, KSP Moeldoko tiba-tiba mengaku sebagai Ketua Partai Demokrat. Beliau bukan anggota Demokrat. Jadi, bukan konflik internal. Ini pihak eksternal, KSP Presiden Jokowi yang mau mengambil alih partai orang lain. sekali dibiarkan, maka semua partai rentan direbut tangan-tangan kuasa.

Jika modus Moeldoko merebut Demokrat disahkan oleh PK di Mahkamah Agung, maka imbasnya bisa menunda pemilu. Karena saya duga Demokrat tidak akan diam, demikian juga pendukung bacapres yang dirugikan.

Saya lihat, Ibu paling tegas menolak presiden tiga periode, lugas menolak penundaan pemilu.

Ibu Megawati, gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi masih terus serius dikerjakan sekelompok pihak. Ini berbahaya dan bisa menjerumuskan bukan hanya Pak Jokowi, tapi kita semua sebagai bangsa.

Silakan Ibu cek informasi ini, dan mohon hentikan siasat penundaan pemilu, yang nyata nyata melanggar konsitusi.

Melbourne, 2 Juni 2023

Prof Denny Indrayana SH LLM Ph.D

Teks yang dituliskan oleh *Prof Denny Indrayana SH LLM Ph.D* jika diinterpretasikan bisa dipahami bahwa teks diatas merupakan sebuah bentuk kekhawatiran akan tegaknya hukum di Indonesia. Kalimat **keselamatan bangsa sedang dipertaruhkan. Masalahnya bukan sistem pemilu tertutup atau terbuka, tapi pemilu yang tertunda.** Dalam Kalimat tersebut Denny berpandangan bahwa proses hukum yang terjadi saat ini telah dinodai dengan campur tangan para penguasa di negeri Indonesia. Bagaimana tidak Denny juga berpandangan bahwa niatan dengan merubah sistem pemilu yang sebelumnya dilakukan terbuka diusulkan untuk menjadi sistem pemilu secara tertutup, ini menandakan bahwa sistem demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran, selain dihadapkan dengan isu penundaan pemilu hal yang menjadi perhatian Denny adalah anggapan mengenai perebutan partai Demokrat oleh Kepala Staff Presiden Moeldoko yang secara tegas dikatakan sebelumnya bahwa Partai Demokrat yang sah adalah Partai yang dipimpin

oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono. Upaya Moeldoko merebut partai Demokrat adalah dengan melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilaksanakan di Kota Medan Sumatera Utara.

Dalam analisis eksplanatifnya, peneliti menyelidiki keterkaitan antara praktik penggunaan bahasa tertulis atau lisan dan lingkungan sosial di mana praktik tersebut terjadi. Penjelasan ini ditujukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap bagaimana teks dianalisis dan diinterpretasikan dalam tahap awal (deskripsi) dan tahap selanjutnya (interpretasi). Pada tingkat ini, peneliti memeriksa serta menjelaskan bagaimana hubungan antara kecenderungan yang terdapat dalam teks, kompleksitas dalam praktik penggunaan bahasa, dan proses-proses yang terjadi dalam perubahan sosial, khususnya dalam konteks pemberitaan Metro TV mengenai kasus Papa Minta Saham.

Wacana Perlawanan Penundaan Pemilu 2024 Pada Media Sosial Twitter

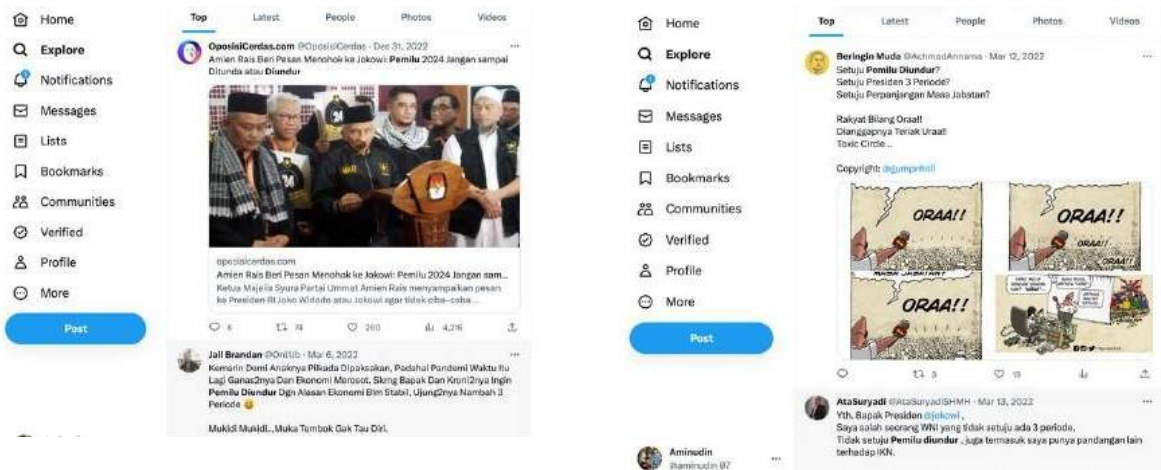
Fairclough menawarkan tiga definisi wacana. Pertama, definisi wacana yang paling umum adalah praktik sosial penggunaan kata-kata. Kedua, wacana dicirikan sebagai gaya bahasa yang digunakan dalam berbagai konteks, termasuk wacana politik, ilmiah, dan lainnya. Ketiga, wacana digunakan untuk menggambarkan metode berbicara yang memberikan makna pengalaman dari sudut pandang tertentu. Contoh tuturan jenis ini antara lain wacana feminis, wacana Marxis, wacana neoliberal, dan sebagainya.

Analisis wacana kritisnya dibangun di sekitar dialektika antara struktur sosial dan wacana, atau praktik sosial. Menurutnya, praktik sosial bukan hanya cerminan realitas yang otonom; sebaliknya, ia terus terlibat dalam dialog dialektis dengan realitas dan memiliki kekuatan untuk mengubahnya. Sebaliknya, realitas dapat mempengaruhi dan membentuk praktik-praktik sosial. Kesimpulannya adalah bahwa wacana atau praktik sosial terikat secara dialektis dengan struktur sosial sebagai komponen realitas.

Fairclough secara otomatis menolak anggapan bahwa wacana setara dengan teks dengan memandang wacana sebagai praktik sosial. Menurutnya, teks adalah produk sampingan dari proses yang digunakan untuk memproduksinya daripada proses itu sendiri. Wacana lebih komprehensif daripada teks itu sendiri, mencakup proses interaksi sosial yang lengkap secara keseluruhan (Fairclough 1998). Alhasil, analisis wacana yang disajikan tidak hanya mempertimbangkan teks tetapi juga bagaimana pembaca mengonsumsinya sekaligus mempertimbangkan bagaimana kaitannya dengan konteks sosio-kulturalnya.

Bagi Fairclough, kontras antara teks dan wacana sangat penting untuk memperkuat pandangannya tentang wacana sebagai praktik sosial. Teks tidak dipandang sebagai otonom, terlepas dari konteks sosial, atau, menggunakan frase Michael Riffaterre, sebuah "teks mandiri" jika hanya dilihat sebagai komponen wacana (W. Said 1983). Louis Althusser mengklaim bahwa teks dipengaruhi oleh lingkungannya dan oleh kekuatan sosial. Said mengklaim bahwa "teks memasukkan wacana" sebagai hasil penciptaannya. Sebuah teks tertulis secara inheren terletak dalam ruang, waktu, dan masyarakat di mana ia muncul ketika itu adalah konsekuensi dari interaksi antara penulis dan media (W. Said 1983).

Penelitian wacana penundaan pemilu ini menggunakan teknis analisis data, yang mana teknis analisis data merupakan suatu proses yang digunakan dalam pengolahan data, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teknik data berkualitas tinggi berkualitas.



Gambar 6 Twit Perlawanan Penundaan Pemilu
Sumber: ("Twitter/ Wacana Penundaan Pemilu" 2022)

Kemunculan media sosial atau internet yang menjadi tempat alternatif menjadi salah satu perkembangan teknologi paling pesat dalam dua dekade pertama abad ke-21. Perkembangan teknologi, khususnya internet dan media sosial, sejalan dengan kemajuan yang memudahkan beragam kegiatan komunitas dalam berbagai bidang kehidupan. Ruang digital saat ini dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk kepentingan politik, fungsi mesin pencari, serta berbagai aktivitas lain yang umumnya terjadi dalam kehidupan nyata. Platform ini tidak lagi hanya sebagai tempat untuk berbagi informasi, melakukan pertukaran informasi, atau berinteraksi, melainkan memiliki peran yang lebih luas dan kompleks (Grecya and Effendi Yahya 2022). Seperti halnya twit yang ditulis oleh media online *oposisicerdas.com* yang membuat judul berita

"Amin Rais beri pesan menohok ke Jokowi: pemilu 2024 jangan sampai ditunda atau diundur"

Judul berita di atas mendapat tanggapan dari khalayak media sosial twitter dengan akun jali Brandan/@Onl1jb dengan komentar sebagai berikut

"Kemarin demi anaknya PILKADA dipaksakan, padahal pandemic waktu itu lagi ganas-ganasnya dan ekonomi merosot. Sekarang Bapak dan kroni-kroninya ingin pemilu diundur dengan alasan ekonomi belum stabil, ujungnya nambah 3 periode..... Mukidi mukidi....., muka tembok ga tau diri"

Penyampaian padangan juga di sampaikan oleh akun Twitter Beringin Muda/@AchmadAnnama menuliskan sebuah twit yaitu

Setuju Pemilu diundur?
Setuju Presiden 3 periode ?
Setuju perpanjangan masa jabatan ?
Rakyat bilang ora !!
Dianggapnya teriak Uraaa !!
Toxic circle

Twit tersebut mendapat komentar dari akun Atasuryadi @AtasuryadiSHMH yang memberikan komentar sebagai berikut:

Yth, Bapak Presiden @jokowi,
Saya salah seorang WNI yang tidak setuju ada 3 periode,
Tidak setuju pemilu diundur, juga termasuk saya punya pandangan lain terhadap IKN

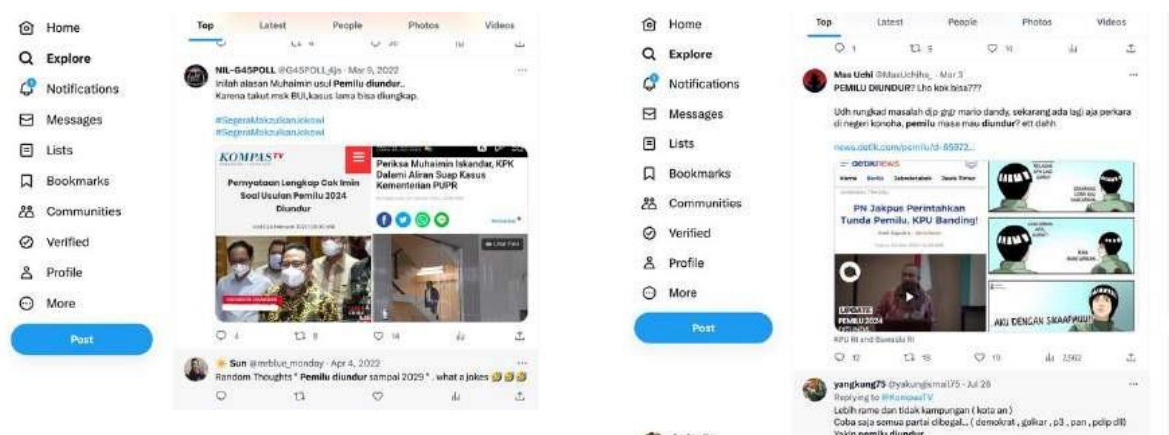
Media sosial hari ini merupakan media yang sangat efektif dalam melakukan kritik sosial, dimana hari ini ada sebuah adagium yang mengatakan bahwa *no viral no justice*, Penggunaan media sosial untuk kritik sosial menciptakan saluran komunikasi untuk memperkenalkan gagasan-gagasan inovatif sekaligus mengevaluasi gagasan-gagasan yang telah ada sebagai upaya menuju perubahan sosial. Kritik sosial, sebagai bentuk komunikasi di dalam komunitas, memiliki tujuan untuk mengawasi atau mengontrol perkembangan sistem sosial atau proses kehidupan bersama.

Praktik Wacana dalam Penundaan Pemilu 2024 Pada Media Sosial Twitter

Untuk menunjukkan keterkaitan antara produksi dan interpretasi proses diskursif, digunakan dimensi praksis wacana pada tataran interpretasi. Pada tahap analisis ini, persoalan utamanya adalah bagaimana pencipta dan penafsir teks bahasa menggunakan berbagai sumber yang dapat digunakan untuk membuat rangkaian wacana. Ada empat tingkatan pada tahap interpretasi teks: (1) bentuk lahiriah ujaran; (2) maknanya; (3) koherensi lokal; dan (4) struktur dan pokok-pokok teks. Ada dua tahap penafsiran pada tahap penafsiran konteks: konteks situasional dan konteks intertekstual. Tiga hal yang menjadi fokus kajian konteks dan interpretasi dalam kaitannya dengan tahap interpretasi konteks: (1) hubungan antara konteks situasional dan jenis wacana; (2) hubungan antara konteks tekstual dan praanggapan; dan (3) tindak tutur (Santoso 2003).

Ketika memutuskan untuk menyiarkan suatu peristiwa atau tidak, media mempertimbangkan banyak faktor, termasuk: Ideologis Dalam komponen ini, kepentingan ideologis media biasanya dipengaruhi oleh sejarah pencipta atau pemilik media. Baik itu melalui agama atau prinsip-prinsip yang diinternalisasi seperti cita-cita sipil, politik, dan sosial. Proses jurnalis menghasilkan berita merupakan faktor lain, selain ideologi. Kebiasaan suatu media dalam mengemas berita adalah rutinitas yang dimaksud. Ia juga dapat dilihat sebagai sesuatu yang telah terpola, sering digunakan oleh para profesional media, dan dipraktikkan. Misalnya, seorang jurnalis yang bekerja untuk tim redaksi harus mematuhi aturan saat menulis artikel atau dalam peliputan sebuah foto, seorang fotografer harus mengambil gambar sesuai dengan *angle* atau sudut pandang yang telah ditentukan redaktornya. Hal tersebut sangat memengaruhi isi dari berita yang akan disampaikan, tentunya sesuai prosedur yang diinginkan oleh media tersebut (Pamela J. Shoemaker and Stephen D. Reese 1996).

Penelitian wacana dalam konteks penundaan pemilu ini menggunakan teknis analisis data, yang mana teknis analisis data merupakan suatu proses yang digunakan dalam pengolahan data, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis



Gambar 7 Twit Praktik Wacana Penundaan Pemilu
Sumber: ("Twitter/ Wacana Penundaan Pemilu" 2022)

Akun twitter NIL-G4SPOLL/G4SPOLL_4ja membuat sebuah tweet dengan tulisan:
 Inilah alasan Muhaimin usul Pemilu diundur..
 Karena takut masuk BUI, kasus lama bisa diungkap.
 #SegeraMakzulkanJokowi
 #SegeraMakzulkanJokowi

Twit tersebut mendapat komentar dari akun Sun/mrblue_Monday dengan komentar sebagai berikut

Random Thought “Pemilu diundur sampai 2029”. *What a jokes*

Arah twit sama juga disampaikan oleh akun Mas Uchi/@MasUchiha dengan twit

Pemilu diundur? Lho ko bisa ?

Udh rungkad masalah djp grgr mario dandy, sekraang adalagi aja perkara di negeri Konoha, pemilu masa mau diundur ?ett dahhh

Twit tersebut mendapat respon dalam bentuk komentar yang disampaikan oleh akun yangkung75/@yangkungismail75 dengan komentar sebagai berikut

Lebih rame dan tidak kumpang (kota an)

Coba saja semua partai dibegal...(demokrat, golkar, p3, pan, pdip dll)

Yakin pemilu diundur..

Praktik Sosial Budaya dalam Penundaan Pemilu 2024 Pada Media Sosial Twitter

Membuat penjelasan bergantung pada sejumlah faktor sosial budaya, seperti kepercayaan, budaya, dan ideologi. Tahap eksplanasi atau eksplanasi mencoba menggambarkan wacana sebagai proses sosial, sebagai praksis sosial, yang menunjukkan bagaimana reproduksi mempengaruhi wacana dan bagaimana wacana dipengaruhi oleh struktur sosial. Struktur sosial dalam setting ini adalah tempat relasi kekuasaan terkonsentrasi. Tahap eksplanasi terdiri dari dua bagian: (1) proses perjuangan terkait wacana sebagai komponen perjuangan sosial, (2) struktur relasi kuasa terkait dengan penjelasan kita tentang penunjukan relasi kuasa dalam menentukan wacana.

Penelitian wacana penundaan pemilu ini menggunakan teknis analisis data, yang mana teknis analisis data merupakan suatu proses yang digunakan dalam pengolahan data, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis



Gambar 7 Twit Praktik Sosial Budaya dalam Penundaan Pemilu

Sumber: (“Twitter/ Wacana Penundaan Pemilu” 2022)

Praktik sosial wacana bisa dilihat dari twit yang dituliskan oleh akun Semut & Lebah/ antbee531 yang menuliskan twit berdasarkan pemberitaan yang dimuat oleh detiknews.com dengan *headline* PSI tak setuju Bawaslu soal penundaan; kami siap menyongsong Pilkada 2024.

Headline tersebut didasari dari sebuah *statement* dari Ketua DPP PSI Ario Bimo, menanggapi *headline* tersebut, akun twitter akun Semut & Lebah/ antbee531 yang menanggapi pemberitaan dengan menuliskan twit sebagai berikut:

Tolak Penundaan Pemilu dan Pilkada 2024!

Konstitusi menyatakan bahwa pemilu dan pilkada 2024 berjalan serentak.
Sudah menjadi tugas dan tanggungjawab penyelenggara untuk
Menjalankan Amanah konstitusi tersebut

#PemiluSerentak2024

#Pemilu2024SesuaiTahapan

Praktik sosial wacana dihembus oleh media online erakini.id yang membuat judul berita “DPR Tegaskan Tak Pernah Ubah Jadwal Pilkada 2024” judul tersebut didasari dari sebuah *statement* yang disampaikan oleh politisi Nasional Demokrat Saan Mustopa. Wacana penundaan pemilu yang dilakukan dengan penggiringan opini atau pendapat telah menggoyahkan keyakinan publik atas penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan tentu menjadi hal yang mengkhawatirkan. Padahal, jadwal pemungutan suara yang telah ditetapkan pada 14 Februari 2024, serta jadwal tahapan yang kini berjalan, sebetulnya sudah menjadi dasar kuat untuk tidak lagi memperdebatkan penundaan.

Hal yang terpenting saat ini justru persiapan penyelenggaraan perlu terus didorong dengan membangun optimisme dan keyakinan publik untuk menyukseskan agenda demokrasi tersebut. Bukan justru mematahkannya dengan wacana-wacana yang membingungkan dan memantik perdebatan berlarut. Penundaan pemilu bisa memiliki konsekuensi politik yang signifikan, termasuk perdebatan mengenai legitimasi pemerintahan dan keabsahan keputusan politik yang diambil selama periode penundaan tersebut. Hal ini penting untuk dipertimbangkan dengan cermat dalam konteks hukum dan demokrasi.

Diskursus Wacana Penundaan Pemilu Tahun 2024

Membahasa soal diskursus tidak terlepas dari ideologi dari masing-masing kelompok. Menurut Fairclough, Ideologi diproduksi dan direproduksi untuk kepentingan kekuasaan (W. Said 1983). Untuk lembaga sosial atau masyarakat secara keseluruhan untuk mendukung atau mempertahankan hubungan kekuasaan, itu harus ada. Menurut definisi Fairclough tentang ideologi, yaitu sebagai berikut: “*significations/constructions of the reality ... which are built into several various dimensions of the forms/meanings of discursive practices and which contribute to the production, reproduction or transformation of relations of dominations*” (Fairclough 1992). Karena bertujuan untuk membangun relasi dominasi dalam masyarakat, produksi makna terhadap realitas melalui bahasa—dalam hal makna tentang dunia, interaksi sosial, dan identitas sosial—bersifat ideologis.

Teori John Thompson, yang mengatakan bahwa ideologi adalah praktik yang ada dalam setiap proses pembentukan makna yang diarahkan untuk menjaga hubungan kekuasaan, memiliki pengaruh signifikan terhadap konsep Fairclough tentang bagaimana ideologi merupakan intrinsik dalam praktik diskursif. (W. Said 1983). Hal ini juga sejalan dengan pendapat akademisi Marxis lainnya, seperti Althusser dan Gramsci, yang melihat pentingnya mempertahankan status quo dengan terus menghasilkan makna dalam kehidupan sehari-hari. Althusser, di sisi lain, menekankan unsur-unsur ideologi yang membuat subjek interpelasi dan berada dalam posisi pasif, sehingga

transformasi sosial tidak mungkin terjadi. Fairclough dengan hati-hati menekankan agensi subjek agar transformasi sosial muncul. Konflik ideologi, dalam pandangannya, justru merupakan salah satu aspek dari praktik diskursif yang bertujuan untuk merombak ideologi dan praktik diskursif saat ini dalam konteks restrukturisasi dan perubahan relasi dominasi.

Ideologi laten hadir dan mendasari praktik dan wacana diskursif sosial. Ideologi memiliki kapasitas yang signifikan untuk mempengaruhi dan membentuk bagaimana subjek menginterpretasikan realitas, membentuk praktik sosial mereka, dan melakukannya justru karena bersifat laten. Lebih jauh lagi, karena ideologi tertanam dalam praktik diskursif, ia dapat dibuat lebih kuat jika keberadaannya diterima sebagai pengetahuan umum (Fairclough 1992) dan diakui kebenarannya oleh masyarakat. Setidaknya ada dua komponen dalam proses naturalisasi. Pertama, ada komponen yang membuat sistem makna tampak transparan, yang disebut Pierre Bourdieu sebagai "pengakuan kesewenang-wenangan yang salah". Dengan kata lain, bahasa menjadi transparan, seolah menggambarkan realitas sebagaimana adanya. Kedua, sistem pemaknaan selalu diperkuat oleh kekuatan-kekuatan yang memberinya legitimasi, seperti kekuatan kaum intelektual dan para ahli atau ilmuwan.

Penonton tidak sadar akan ideologi yang mendasari beberapa praktik diskursif dan ditanamkan dalam bahasa, yang merupakan efek ideologis. Meskipun Fairclough memasukkan perjuangan ideologis sebagai salah satu komponen dalam praktik diskursif untuk memodifikasi praktik diskursif dan ideologi yang mendasarinya dalam konteks relasi dominasi yang bergeser, hal ini tidak berarti bahwa ideologi bersifat statis dan tidak berubah (Jorgensen and Phillips 2002). Pengakuan Fairclough terhadap konsep hegemoni Antonio Gramsci memperkuat kontestasi ideologis dalam ruang sosial. Hegemoni kemudian dipandang memiliki kendali atas masyarakat dan diperoleh melalui aliansi dengan kekuatan sosial lainnya yang menghasilkan keseimbangan yang tidak stabil, berdasarkan teori bahwa "akal sehat" memiliki banyak bagian yang bersaing satu sama lain dalam ruang negosiasi makna. (Fairclough 1992). Hegemoni tidak hanya mencakup aspek dominasi, melainkan juga menggambarkan sebuah arena dimana terjadi negosiasi mengenai makna dari berbagai kekuatan sosial yang terlibat dalam pertarungan hegemoni, dimana mereka bersaing untuk mendapatkan dukungan dan penerimaan dari masyarakat luas.



Gambar 8 Twit Diskursus Wacana Penundaan Pemilu

Sumber: ("Twitter/ Wacana Penundaan Pemilu" 2022)

Penelitian wacana penundaan pemilu ini menggunakan teknis analisis data, yang mana teknis analisis data merupakan suatu proses yang digunakan dalam pengolahan data, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis. Wacana pertama yang dihembuskan oleh media online antara.com yang membuat judul berita “Penundaan Pilkada serentak tak selaras dengan undang-undang” judul berita tersebut didasari dari sebuah *statement* yang disampaikan oleh Mahfud MD selaku Menko Polhukam yang mengatakan bahwa:

“Keberadaan penyelenggaraan pemilu, termasuk Bawaslu, justru bertujuan agar tidak ada penundaan pemilu. Semestinya mereka mampu melakukan upayaantisipasi sehingga pemilu tetap bisa berlangsung”

Pernyataan Mahfud MD tersebut mendapat komentar dari akun twitter nomasiha/@Nomahbirashn yang mengatakan bahwa:

“Konstitusi menyatakan bahwa pemilu dan pilkada 2024 berjalan serentak. Sudah menjadi tugas dan tanggung jawab penyelenggara untuk menjalankan Amanah konstitusi tersebut. Isu penundaan pemilu pilkada juga akan berpotensi mengganggu stabilitas sosial-politik di daerah”.

Hal yang sama juga masih disampaikan oleh Mahfud MD dalam judul berita yang disampaikan oleh media online Kompas.com yang membuat judul

“Minta Semua Pihak Ciptakan Pemilu Damai, Mahfud MD: Jangan Sampai Ditunda Satu Hari pun”

Berita yang disampaikan media online Kompas.com ini mendapat tanggapan dari akun twitter boyang majene/@BoyangMajene dengan twit sebagai berikut:

Tolak penundaan Pemilu dan Pilkada 2024!
#PemiluSerentak2024
#Pemilu2024SesuaiTahapan
#Pemilu2024
#KPU
#Bawaslu

Dalam teks yang ditulis, Wacana diidentifikasi sebagai jenis interaksi. Kegiatan yang melibatkan penggunaan bahasa yang diciptakan oleh seseorang tidak melibatkan diri orang itu sendiri secara mendalam, tidak seperti orang-orang yang sedang cekikikan atau di bawah pengaruh hipnotis. Namun, penggunaan bahasa setiap orang memiliki tujuan untuk berinteraksi dengan orang terdekat. Tujuan interaksi ini antara lain menghibur, mencerahkan, merangsang debat, dan lain-lain. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penggunaan bahasa dalam bisnis memiliki tujuan tertentu dan dilakukan secara diam-diam di bawah pengawasan yang ketat, terutama saat mengumpulkan pendapat calon karyawan.

Dalam memahami perdebatan makna pemilu, masyarakat awam telah mengalami beberapa bentuk konstruksi. Namun, salah satu atau beberapa di antaranya menjadi lebih dominan karena keinginan untuk memperkuat dan melanjutkan wacana yang ada. Penulisan eksperimental yang disajikan dalam teks dan digunakan dalam kosakata dilakukan untuk mengidentifikasi kemiripan antara ideologi yang dibahas dalam teks dan jenis wacana lainnya, dan untuk mendeskripsikannya se spesifik mungkin. Nilai eksperiensial ini dapat diperoleh dengan memeriksa penggunaan kosa kata tertentu secara berlebihan, yang menunjukkan preferensi pembuat teks untuk aspek realitas tertentu, dan penggunaan skema klasifikasi, yang menunjukkan bagaimana realitas dibagi menjadi kategori berdasarkan representasi ideologis tertentu dari realitas.

Pada tataran wacana, dipahami bahwa mengubah konstitusi adalah cara terbaik untuk menunda pemilu. Hal ini menyebabkan berbagai penolakan dari sejumlah profesor, anggota parlemen, sekelompok mahasiswa, dan lain sebagainya. Meski ada dukungan rakyat untuk

memperpanjang masa jabatan presiden dan menunda Pemilu 2024, hal ini tidak cukup menjadi pembenaran untuk mengubah UUD 1945.

Selain itu, menurut Zainal Arifin Mochtar, Guru Besar Hukum Tata Negara UGM, UU Pilkada perlu diubah jika memang ingin bersiap menghadapi bencana akibat pandemi COVID. Dengan mempertimbangkan konteks tersebut di atas, ada baiknya membicarakan penundaan pemilu 2024 serta dampak yang ditimbulkannya.

Menurut (ICW 2022) Perdebatan penundaan pemilihan umum 2024 pada dasarnya melanggar hukum, melanggar konstitusi, dan mengingkari hak-hak rakyat. Hal itu agar kewenangan eksekutif dan legislatif dibatasi secara kaku selama 5 (lima) tahun berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yang juga mengatur bahwa pemilu harus diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Usulan penundaan pemilu 2024 juga menggambarkan kontradiksi partai dalam keputusan politik yang diambil, menunjukkan pragmatisme politik kepentingan partai, dan menunjukkan kurangnya komitmen partai politik untuk menegakkan dan memelihara nilai-nilai demokrasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Analisa dari wacana penundaan pemilu menggunakan perspektif norman Fairclough dapat disimpulkan bahwa: Pertama, narasi/teks berita yang dipakai oleh pengguna media sosial twitter tidak hanya sekedar teks berita, akan tetapi bernuansa argumentasi dan deskripsi yang menjelaskan isu pemberitaan ini terhadap pemirsa tentang isu penundaan pemilu 2024. Seperti halnya yang disampaikan oleh Denny Indrayana Misalnya yang lebih mengarah argumentasi dari kekhawatirannya tentang dugaan penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan dari penguasa. Kedua, wacana media sosial khususnya twitter cenderung mengangkat isu-isu kontroversial yang ada di Indonesia, isu kontroversi yang dimaksud adalah adanya dugaan upaya melawan hukum dan cenderung bersifat politis yang artinya kepentingan si pembuat konten lebih dominan dari pada pemberitaan yang berimbang. Yang terakhir adalah jika dilihat dari aspek ideologi, media sosial twitter memberikan pencitraan negatif dengan menyudutkan penguasa negeri dalam hal ini pemimpin pemerintah era presiden Jokowi, sehingga publik menilai negatif tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang dari pihak istana. Ini disebabkan oleh serangkaian wacana mengenai penundaan Pemilu 2024 yang berasal dari koalisi penguasa yang terdiri dari tokoh-tokoh seperti Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Plt. Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono, dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Oleh karena itu, terdapat kecenderungan bahwa isu yang diangkat cenderung bersifat menyerang lawan politik mereka.

Isu penundaan secara nyata memang hanya menghadirkan kegundahan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan, terutama penyelenggara, yakni KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Wacana penundaan yang berkembang berpotensi menjadi sentimen negatif yang juga dapat memengaruhi persiapan yang saat ini sedang dilakukan KPU. Kondisi itu secara jelas ditangkap oleh publik yang memberikan atensinya pada proses penyelenggaraan yang terganggu akibat isu penundaan. Setidaknya mayoritas responden menyatakan khawatir atas wacana penundaan pemilu yang bergulir.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfathri, Adlin. 2016. "Michel Foucault: Kuasa/Pengetahuan (Rezim) Kebenaran, Parrhesia." *Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam* 1 (1): 13–26.
- Aminudin, Amin. 2022. "Menghadapi Disinformasi Konten Berita Digital Di Era Post Truth." *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi* 6 (2): 283–92. <https://doi.org/10.51544/jlmk.v6i2.3137>.
- Badara, Aris, and Jamiludin. 2020. "Representation of Indonesian Women Workers: A Critical Discourse Analysis on the Newspapers of Nationalist-Secular and Islamic Ideological Perspectives." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 10 (1): 79–101. <https://doi.org/10.18326/ijims.v10i1.79-101>.
- Bolter, J. D, and R. Grusin. 2000. *Remediation: Understanding Media*. USA: MIT Press.
- Denny Indrayana. 2023. "Akun Twitter Denny Indrayana." <https://twitter.com/Dennyindrayana/status/1664495109357047809>. July 2, 2023.
- Eriyanto. 2005. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Fairclough, Norman. 1992. *Discourse and Social Change*. Cambridge: Polity Press.
- . 1998. *Language and Power*. Vol. 10. New York: Longman Inc.
- Grecya, Elsa, and Ilham Effendi Yahya. 2022. "Improving Civic Engagement through 'No Viral No Justice' Phenomenon." *Journal Civic and Social Studies* 6 (1): 2022–51. <https://doi.org/10.31980/civicos.v6i1.1629.g1177>.
- Haryadi Santoso, Didik. 2015. "Media Dan Politik: Pertarungan Ruang & Kuasa Media Menjelang Pemilihan Presiden." *Jurnal Simbolika* 1 (1): 1–6.
- ICW. 2022. "Usulan Penundaan Pemilu 2024: Melanggar Konstitusi Dan Merusak Sistem Demokrasi Di Indonesia." <https://antikorupsi.org/id/usulan-penundaan-pemilu-2024-melanggar-konstitusi-dan-merusak-sistem-demokrasi-di-indonesia>. March 2, 2022.
- Ismail, Habibah, Hazleena Baharun, Hazlina Abdullah, and Siti Norzaimalina Abd Majid. 2020. "Power and Voices of Authority in the Media Narrative of Malaysian Natives: Combining Corpus Linguistics and Discourse Analysis Approaches." *3L: Language, Linguistics, Literature* 26 (2): 50–66. <https://doi.org/10.17576/3L-2020-2602-04>.
- Jorgensen, Marianne, and Louise Phillips. 2002. *Discourse Analysis*. London: SAGE Publications Ltd.
- Kamahi, Umar. 2017. "Teori Kekuasaan Michel Foucault : Tantangan Bagi Sosiologi Politik." *Jurnal Al-Khitabah* 3 (1): 117–33.
- Kemp, Simon. 2023. "Digital 2023: Indonesia." <https://datareportal.com/reports/digital-2023-indonesia>. June 7, 2023.
- Miranti, Adita, and Yudi Sudiana. 2021. "Pelecehan Seksual Pada Laki-Laki Dan Perspektif Masyarakat Terhadap Maskulinitas (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough)." *Bricolage : Jurnal Magister Ilmu Komunikasi* 7 (2): 261–76. <http://journal.ubm.ac.id/>.
- Mouna, Benhaddou. 2021. "Critical Discourse Analysis on the Representation of Muslims in Britain in the Daily Mail Newspaper." *International Journal of Language and Literary Studies* 3 (3): 216–24. <https://doi.org/10.36892/ijlls.v3i3.624>.
- Nasrullah, Rulli. 2014. *Teori Dan Riset Media Siber (Cybermedia)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Nurhidayat, Ipan, and Regi Refian Garis. 2023. "Trend Komunikasi Politik Di Media Sosial." *Jurnal Lanskap Politik* 1 (2).
- Nurudin. 2007. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- O'regan, John. 2001. "Discourse In Late Modernity: Rethinking Critical Discourse Analysis." *Language and Intercultural Communication* 1 (2): 151–74. <https://doi.org/10.1080/14708470108668070>.
- Pamela J. Shoemaker, and Stephen D. Reese. 1996. *Mediating The Message: Theories of Influences on Mass Media Content*. Second Edition. Longman: USA.
- Santoso, Anang. 2003. *Bahasa Politik Pasca Orde Baru*. Jakarta: Wedamata Widya Sastra.
- . 2015. "Studi Wacana Kritis, Pengajaran Bahasa Indonesia, Dan Perspektif Emansipasi." *Bahasa Dan Seni* 43 (2): 227–39.

- Sipahutar, Calvin Moniaga, Ana Fitriana Poerana, and Nurkinan. 2020. "Pengalaman Komunikasi Curhat Anonim Bagi Followers @18autobase Di Twitter." *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi* 4 (2): 56–74.
- Syafiuddin, Arif. 2018. "Pengaruh Kekuasaan Atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault)." *Refleksi: Jurnal Filsafat Dan Pemikiran* 18 (2): 141–55.
- Syecha, and Solihah Titin Sumanti. 2023. "Analysis of Interpersonal Communication Patterns of Love Scams Mode on Social Media in Female Students in Medan City." *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi* 7 (1): 74–85. <https://doi.org/10.51544/jlmk.v7i1.3827>.
- Taylor, Dianna. 2014. *Michel Foucault Key Concepts*. New York: Routledge.
- "Twitter/ Wacana Penundaan Pemilu." 2022. <https://twitter.com>. March 9, 2022.
- Umanilo, M. Chairul Basrun. 2020. "Pemikiran Michel Foucault." *Open Anthropology Reserch* 1 (1): 12–04.
- W. Said, Edward. 1983. *The World, the Text and the Critic*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press